

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. H. Mohammad Rum MT

NIP. 19660316 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	16
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	18
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	20
F. Pengungkapan Penting Lainnya	21
VI. Lampiran dan Daftar	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 631060 – 632632 Fax. (0370) 634926
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. H. Mohammad Rum, MT
NIP. 19660316 199402 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 seluruhnya berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00-. Tidak terdapat estimasi pendapatan pada TA 2022.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 280.397.482,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 282.662.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp280.397.485,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(280.397.485,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan defisit sebesar Rp(0,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(280.397.485,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp0,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp(280.397.482,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.280.397.482,- sehingga nilai ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	0,-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Rupiah Murni					
Belanja Pegawai		-	-	0,-	-
Belanja Barang	B.3	282.662.000,-	280.397.482,-	99,20	253.282.497,-
Belanja Modal		-	-	0,-	-
Jumlah Belanja		282.662.000,-	280.397.482,-	99,20	253.282.497,-
JUMLAH BELANJA		282.662.000,-	280.397.482,-	99,20	253.282.497,-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,-	0,-
Kas lainnya dan Setara Kas	C.2	0,-	0,-
Jumlah Aset Lancar		0,-	0,-
JUMLAH ASET		0,-	0,-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3	0,-	0,-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4	0,-	0,-
Uang Muka dari KPPN	C.5	0,-	0,-
JUMLAH KEWAJIBAN		0,-	0,-
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	(0,-)	0,-
Jumlah Ekuitas		(0,-)	0,-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0,-	0,-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0,-	0,-
JUMLAH PENDAPATAN		0,-	0,-
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	8.996.100,-	6.778.300,-
Beban Jasa	D.3	47.353.668,-	50.527.997,-
Beban Perjalanan Dinas	D.4	224.047.714,-	195.976.200,-
JUMLAH BEBAN		280.397.482,-	253.282.497,-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(280.397.482,-)	(253.282.497,-)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,-	0,-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(280.397.482,-)	(253.282.497,-)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(280.397.482,-)	(253.282.497,-)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(280.397.482,-)	(253.282.497,-)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	-	-
Koreksi Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	280.397.482,-	253.282.497,-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
EKUITAS AKHIR	E.5	0,-	0,-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu Unit yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan;
- Meningkatkan kualitas informasi Penanaman Modal;
- Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal;
- Meningkatkan peran serta UMKM dalam Penanaman Modal;
- Mendorong terciptanya iklim Penanaman Modal yang kondusif.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI dilakukan menggunakan modul General Ledger dan Pelaporan (GLP). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Dekonsentrasi DPMPTSP NTB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan dan dicatat menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,-. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak menetapkan estimasi pendapatan pada Tahun 2022, namun demikian setiap penerimaan negara yang diterima akan dibukukan dan dicatat dalam Laporan Keuangan.

B.2. Belanja

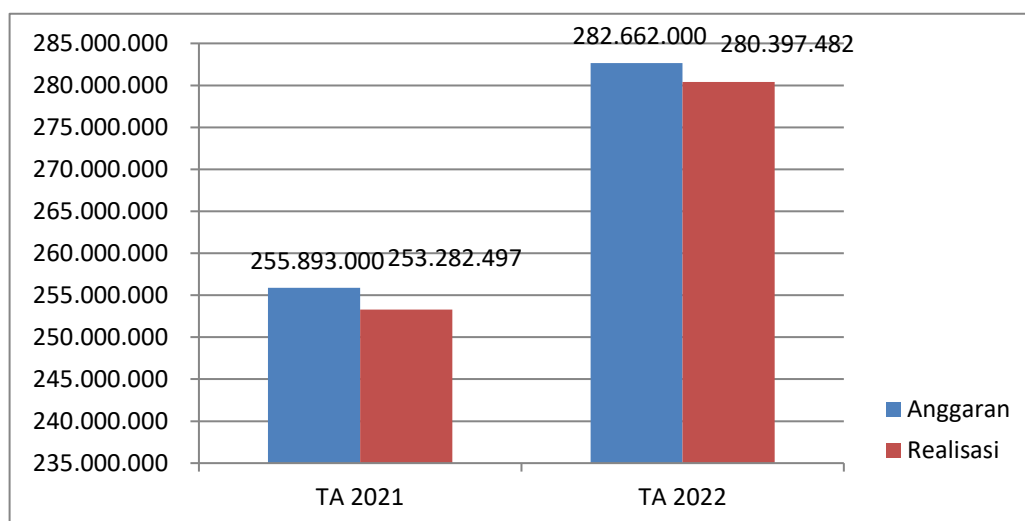
Realisasi Belanja
Negara Rp.
280.397.482,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 280.397.482,- atau 99,20 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.282.662.000,-. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Satuan Kerja Dekonsentrasi hanya mengelola jenis belanja barang saja. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	282.662.000	280.397.482,00	99,20
Jumlah	282.662.000	280.397.482,00	99,20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,71% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena Anggaran Tahun 2022 lebih besar dari Tahun 2021, selisih Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 yakni Rp. 26.796.000

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	280,397,482	253,282,497	10.71%
Jumlah	280,397,482	253,282,497	10.71%

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp280.397.482,-

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.280.397.482,- dan Rp.253.282.497,-. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 10,71% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena Anggaran Tahun 2022 lebih besar dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	32,489,600	34,676,000	(6.31)
Belanja Barang Non Operasional	8,852,500	6,570,500	34.73
Belanja Persediaan	8,996,100	6,778,300	32.72
Belanja Sewa	6,011,568	9,281,497	(35.23)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	224,047,714	195,976,200	14.32
Jumlah Belanja Kotor	280,397,482	253,282,497	10.71
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	280,397,482	253,282,497	10.71

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Uang Tunai	-	-
Kas di Bank	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp.0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-.

Tabel C.2.

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	31 DES 2022 (Rp)	31 DES 2021 (Rp)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
JUMLAH	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2022 Rp.0,- merupakan uang perjalanan dinas yang belum diserahkan kepada pihak penerima.

C.3 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- dan Rp 0,- merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.18.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 30 SEPTEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	31 DES 2022 (Rp)	31 DES 2021 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
JUMLAH	0	0

C.4 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.5 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp. 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.6 Ekuitas

Ekuitas
Rp0,-

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 September 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.8.996.100,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.8.996.100,- dan Rp.6.778.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8,996,100	6,778,300	32.72%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	8,996,100.00	6,778,300.00	32.72%

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa
Rp.47.353.668,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.47.353.668,- dan Rp 50.527.997,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa Lainnya	47,353,668.00	50,527,997.00	-6.70%
Jumlah	47,353,668.00	50,527,997.00	-6.70%

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp.224.047.714,-

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.224.047.714,- dan Rp.195.976.200,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	192,262,994.00	171,408,400.00	10.85%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,320,000.00	3,600,000.00	-55.17%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,095,000.00	16,450,000.00	22.02%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,369,720.00	4,517,800.00	46.02%
Jumlah	224,047,714.00	195,976,200.00	12.53%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defisit LO
Rp(280.397.482,-)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(280.397.482,-) dan Rp(253.282.497,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

*Diterima dari Entitas
Lain Rp0,-/Ditagihkan
ke Entitas Lain
Rp0,-*

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp(0,-) dan DKEL sebesar (Rp.0,-)

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar Entitas
Rp.280.397.482,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.280.397.482,- dan Rp.253.282.497,-.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

Transaksi antar Entitas per 31 Desember 2022

<i>Transaksi antar Entitas</i>	<i>Nilai</i>
Ditagihkan ke Entitas lain	280.397.482,-
<i>Jumlah</i>	<i>280.397.482,-</i>

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp0,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

--

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Realisasi atau penyerapan untuk perjalanan dinas ke Pulau Lombok hanya di berikan satu (1) hari, menyebabkan nilai realisasi kecil yakni sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan uluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) Tim yakni 2 (dua) orang, dan perjalanan dinas ke Pulau Lombok tidak bisa melakukan/melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan kabupaten/kota, sebelum terjun langsung ke lokasi proyek di Kabupaten di maksud.

Diharapkan di tahun berikutnya diberikan perjalanan dinas ke pulau Lombok 2 (dua) hari untuk penyerapan anggaran atau realisasi lebih cepat dan dapat berkoordinasi dan konsultasi tentang perusahaan/proyek yang akan di kunjungi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

1. NERACA
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5. SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN MATARAM
6. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA (LPJ)
7. REKENING KORAN
8. SSPB/SSBP
9. BERITA ACARA STOK OPNAME